



Piutang Pajak Belum Tertagih Rp2,06 M

YOGYAKARTA – Piutang pajak dan retribusi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY terhadap Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2016 yang berpotensi tak tertagih masih kurang bayar Rp2,06 miliar.

Pemkot Yogyakarta diminta menuntaskan persoalan tersebut agar tak menjadi catatan dalam neraca keuangan di tahun-tahun mendatang. "Ada 12 item dalam daftar inventaris masalah (DIM) senilai total Rp3,58 miliar. Hasil klarifikasi dengan pemkot sudah terbayarkan Rp1,51 miliar. Jadi masih kurang Rp2,06 miliar," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK DIY, DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri, kemarin.

Rapat pansus beragenda klarifikasi bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta pada Rabu (31/5) kemarin, jelas Nasrul, nilai kurang bayar sebesar Rp2,06 miliar diakui oleh BPKAD tengah dalam upaya penagihan.

Selain itu, BPKAD juga memaparkan temuan terkait retribusi sampah telah dilaksanakan rekomendasi dengan penyetoran ke kas daerah, MoU dengan PLN telah disusun, dan tagihan piutang pajak reklame sebagian sudah dibayarkan. Sementara itu, tagihan pajak hotel sebagian telah dibayarkan, piutang pajak hotel Saphir masih macet, dan tagihan retribusi kios tutup sebagian telah dibayarkan.

Politikus PKS itu mengata-

kan, dalam rapat pansus kemarin pihaknya belum rampung meminta klarifikasi upaya penagihan. Senin (5/6) besok pansus kembali menjadwalkan rapat klarifikasi ulang bersama BPKAD dilanjutkan rapat internal pansus guna menyusun rekomendasi.

"Pansus tetap minta piutang pajak dituntaskan. Jika jelas tidak tertagih, maka harus ada ikhtiar nyata, seperti segera bentuk tim juru sita atau eksekusi Perwal tentang Penghapusan Piutang Pajak/Retribusi. Prinsipnya piutang jangansampai tercatat lagi dalam neraca keuangan," jelasnya.

Kepala BPKAD Kota Yogyakarta Kadri Renggono memastikan pihaknya telah menindaklanjuti rekomendasi BPK. Hal tersebut bisa dilihat dari piutang yang sudah dibayarkan mencapai Rp1,51 miliar dari total Rp3,58 miliar.

Sisanya, pihaknya tetap berupaya melakukan penagihan secara berkala. "Kami sudah layangkan surat tagihan. Ada yang sudah membayar, ada yang belum tapi sudah berkomitmen untuk membayar," ujarnya.

Opsi lain berupa penyitaan aset, diakuinya tak bisa dilakukan karena Pemkot belum memiliki tim juru sita.

Sementara terkait penghapusan piutang yang sudah diatur dalam Perwal 19/2015, masih membutuhkan kajian yang mendalam.

• **ristu hanafi**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005